



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OSCAR PRIMADI
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 86457

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 7.994.900.000**

1. Tanah Seluas 350 m2 di PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 263 m2/3127 m2 di PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/200 m2 di PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/208 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 53 m2/53 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 894.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 503.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 118.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 185.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. 283.474.178**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.593.933.521
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	14.560.307.699
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	14.560.307.699

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.